

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL**

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
3. Sistematika Penulisan CALK	5
BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN	
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
1. Ekonomi Makro	6
2. Kebijakan Keuangan	9
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	13
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja	20
2. Hambatan dan Kendala	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	22
1. Entitas Akutansi	22
2. Basis Akutansi	22
3. Basis Pengukuran	22
4. Penerapan Kebijakan	22
BAB V PENJELASASN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	23
1. Rincian Masing-masing Pos	23
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	25
A. Umum	25
B. Khusus	26
BAB VII PENUTUP	28

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, juga masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera .

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2024. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut. Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di tahun-tahun berikutnya.

Demikian, semoga bermanfaat.

Bantul, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul



Stephanus Heru Wismantara, SIP. MM.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. : 196512261986021001

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah kabupaten yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- l. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Ekonomi Makro
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI	Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
Bab VII	Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kebangsaan Bantul berpengaruh terhadap ekonomi makro, baik di sekitar rill maupun sektor non rill. Outcome-nya memang tidak langsung kelihatan seperti pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain. Akan tetapi situasi sosial politik yang kondusif akan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Tidak akan mungkin kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar jika tidak didukung dengan stabilitas sosial politik yang kondusif. Di sinilah peran penting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.415.668
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.890.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.650.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.990.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.144.926
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.154.814.926
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.480.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	37.850.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.703.420
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.814
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.252.606
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.864.000
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000
5.	Penyediaan Bahan/Material	7.500.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.694.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.710.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.710.000
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.002.712
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.328.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.474.712
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.964.610
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.000.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000
3.	Pemeliharaan Mebel	7.895.700
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.570.000
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.498.910
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.276.392.500
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.276.392.500
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.000.000
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.251.392.500
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	34.182.209.200
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	34.182.209.200
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	34.182.209.200

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	608.852.500
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	608.852.500
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	608.852.500
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	399.009.000
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	399.009.000
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.375.000
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	287.634.000
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	105.000.000
G	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	120.000.000
I	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	120.000.000
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	120.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN	41.005.878.868

2. Kebijakan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.415.668	3.533.434.366
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.890.000	26.90.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.650.000	12.650.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.250.000	4.250.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.990.000	9.990.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.144.926	2.777.149.793
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.154.814.926	2.633.819.793
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.480.000	105.480.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	37.850.000	37.850.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.703.420	3.141.84.420
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.814	2.992.814
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.252.606	36.921.606
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.864.000	22.864.000
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	1.200.000
5.	Penyediaan Bahan/Material	7.500.000	7.500.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.694.000	242.706.000
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.710.000	46.160.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.710.000	46.160.000
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.002.712	55.344.524
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.328.000	669.812
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.474.712	53.474.712

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.964.610	313.705.629
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.000.000	191.467.400
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	5.682.600
3.	Pemeliharaan Mebel	7.895.700	7.870.700
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.570.000	19.570.000
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.498.910	891.149.29
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.276.392.500	1.221.650.820
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.276.392.500	1.221.650.820
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.000.000	22.642.000
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.251.392.500	1.199.008.820
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	34.182.209.200	34.156.561.567
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	34.182.209.200	34.156.561.567
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	34.182.209.200	34.156.561.567

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000	289.884.000
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000	289.884.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	289.884.000
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	608.852.500	560.823.250
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	608.852.500	560.823.250
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	608.852.500	560.823.250
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	399.009.000	362.016.500
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	399.009.000	362.016.500
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.375.000	1.062.500
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	287.634.000	263.784.000

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	105.000.000	97.170.000
G	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	120.000.000	118.600.000
I	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	120.000.000	118.600.000
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	120.000.000	118.600.000
	JUMLAH KESELURUHAN	41.005.878.868	40.242.970.503

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator pencapaian target kinerja APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, Sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (OUT PUT)	CAPAIAN HASIL (OUT COME)	KET
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.890.000	26.90.000			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.650.000	12.650.000	Jumlah Dokumen Perencanaan	Capaian kinerja perencanaan, Penganggaran, evaluasi	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.250.000	4.250.000	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Capaian kinerja perencanaan, Penganggaran, evaluasi	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.990.000	9.990.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Capaian kinerja perencanaan, Penganggaran, evaluasi	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.144.926	2.777.149.793			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.154.814.926	2.633.819.793	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.480.000	105.480.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	37.850.000	37.850.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	

III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.703.420	3.141.84.420				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.992.814	2.992.814	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.252.606	36.921.606	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	3 paket	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.864.000	22.864.000	Jumlah Barang Cetak dan pengandaan yang disediakan	6 paket	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	1.200.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	12 paket	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
5.	Penyediaan Bahan/Material	7.500.000	7.500.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	30 paket	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.694.000	242.706.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	390 laporan	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.710.000	46.160.000				
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.710.000	46.160.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.002.712	55.344.524				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Capaian pengelolaan administrasi umum	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.328.000	669.812	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Capaian pengelolaan administrasi umum	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.474.712	53.474.712	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	30 laporan	Capaian pengelolaan administrasi umum	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.964.610	313.705.629				

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.000.000	191.467.400	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	Capaian pengelolaan administrasi umum	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	5.682.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	Capaian pengelolaan administrasi umum	
3.	Pemeliharaan Mebel	7.895.700	7.870.700	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	Capaian pengelolaan administrasi umum	
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.570.000	19.570.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	20 unit	Capaian pengelolaan administrasi umum	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.498.910	89.114.929	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	Capaian pengelolaan administrasi umum	
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.276.392.500	1.221.650.820				
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.276.392.500	1.221.650.820				
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.000.000	22.642.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 orang	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.251.392.500	1.199.008.820	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1450 orang	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	

C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	34.182.209.200	34.156.561.567			
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	34.182.209.200	34.156.561.567			
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik Di Daerah	34.182.209.200	34.156.561.567	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	3800 orang	Cakupan kalurahan dalam pemahaman demokrasi
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	300.000.000	289.884.000			
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000	289.884.000			

1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	289.884.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 orang	Cakupan pembinaan Ormas	
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	608.852.500	560.823.250				
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	608.852.500	560.823.250				
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	608.852.500	560.823.250	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1875 orang	FKUB aktif	
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	399.009.000	362.016.500				
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	399.009.000	362.016.500				

1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.375.000	1.062.500	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	287.634.000	263.784.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 orang	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	
3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	105.000.000	97.170.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	
G	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	120.000.000	118.600.000				
I	ADAT, SENI, TRADISI, DAN LEMBAGA BUDAYA	120.000.000	118.600.000				
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	120.000.000	118.600.000	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 dokumen	Cakupan lokasi yang prakondisi	
	JUMLAH KESELURUHAN	41.005.878.868	40.242.970.503				

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul

Realisasi Penerimaan

Jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar	Rp. 440.000.000,00
Jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar	Rp. 3.730.521.620,00
Jumlah SP2D tambah uang (TU) sebesar	Rp. 211.410.000,00
Jumlah SP2D LS	<u>Rp. 35.998.995.072,00</u>
Jumlah Total Penerimaan	Rp. 40.380.926.692,00

Realisasi Pengeluaran

Jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar	Rp. 307.643.811,00
Jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar	Rp. 3.730.521.620,00
Jumlah SP2D tambah uang (TU) sebesar	Rp. 205.810.000,00
Jumlah SP2D LS	<u>Rp. 35.998.995.072,00</u>
Jumlah Total Pengeluaran	Rp. 40.242.970.503,00

Jumlah sisa kas/setoran ke Kasda

Jumlah setoran sisa UP sebesar	Rp. 132.356.189,00
Jumlah setoran sisa TU sebesar	Rp. 5.600.000,00
Jumlah setoran sisa LS	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah sisa kas/setoran ke Kasda	Rp. 137.956.189,00

Sisa kas yang disetor ke Kasda sebesar Rp 137.956.189,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2024 adalah perlu lebih banyak koordinasi antar stakeholder dan pemangku kepentingan.

Dari sisi sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih perlu ditambah dan ditingkatkan baik kuantitas dan kualitas SDM-nya. Sebagai gambaran dari 18 orang ASN, 3 orang berpendidikan pasca sarjana, 8 orang pegawai yang berpendidikan sarjana, 2 orang pegawai berpendidikan D-III, dan 5 orang berpendidikan SLTA. pegawai tidak tetap di Kabupaten Bantul. Di samping diperlukan penempatan SDM yang sesuai kemampuan, juga diperlukan pelatihan-pelatihan misalnya untuk pembuatan laporan keuangan, administrasi, komputer, dan lain-lain.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 41.005.878.868,-** (Empat puluh satu miliar lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh Rupiah). Secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar **Rp. 40.242.970.503,-** (Empat puluh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 40.959.818.868,- (Empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 40.197.460.503,- (Empat puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tiga Rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	3.272.944.926	2.739.949.793
2	Belanja Barang dan Jasa	4.374.890.942	4.145.530.543

3.	Belanja Hibah	33.311.983.000	33.311.980.167
Jumlah		40.959.818.868	40.197.460.503

3.2 Belanja Modal

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 46.060.000,- (Empat puluh enam juta enam puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 45.510.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.060.000	45.510.000
Jumlah		46.060.000	45.510.000

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat diukur dengan satuan uang.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Kesatuan Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sarana dan Pendukung Kegiatan Administrasi dan Operasional

Pendukung Kegiatan Administrasi

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 18 (delapan belas) orang

Menurut kualifikasi pendidikan :

SLTA/ SMK : 5

D3 : 2

S1 : 8

S2 : 3

Sedangkan menurut golongan adalah :

Golongan II : 3

Golongan III : 9

Golongan IV : 4

6.3 Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Untuk melaksanakan kegiatan dinas utamanya kegiatan operasional dan untuk

mencapai target kinerja yang optimal dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mobil operasional tertutup	:	4
Sepeda motor operasional	:	9
Kamera	:	1
LCD	:	3
Laptop	:	6
Komputer	:	17
HT	:	8
Sepeda	:	3
Printer	:	14
AC	:	16
Genset	:	1
Kipas Angin	:	8
Kulkas	:	1
Mesin Fax	:	1
Mesin ketik	:	1
Speaker Aktif	:	2
Kursi Tamu	:	6
Kursi Putar Staf	:	4
Kursi Struktural Eselon III	:	2
Kursi Eselon IV	:	3
Kursi Pimpinan	:	1
Kursi Tunggu	:	8
Kursi Rapat	:	57
Dispenser	:	2
Rak Arsip	:	1
Filling Cabinet	:	8
Finger Print	:	1

Televisi	:	3
Tabung APAR	:	2
Lemari Kayu	:	12
Meja Kerja	:	30
Scanner	:	2
Handy Camp	:	1
CPU	:	3
Monitor	:	3

6.4 Pencapaian Kinerja Non Keuangan

Beberapa pencapaian kinerja non keuangan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024 antara lain :

a. Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan daftar nominatif pegawai
2. Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
3. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
4. Pembuatan kenaikan gaji berkala pegawai
5. Pengusulan pensiun pegawai
6. Pembuatan cuti pegawai
7. Penyusunan Anjab, ABK, SKP

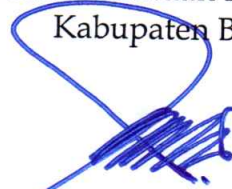
BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Bantul, 31 Desember 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul



St. HERU WISMANTARA, SIP.MM
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP. : 196512261986021001